
PERAN PEMERINTAH DALAM MENYEIMBANGKAN SUBSIDI SEBAGAI KEBIJAKAN FISKAL UNTUK MENDUKUNG PEREKONOMIAN TIGA SEKTOR

Ishlah Zaizafun Nabilah¹, Muhammad Isbad Addainuri²

¹ Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Madura

² Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: ishlahzn@gmail.com, itsbadayenk25@gmail.com

Abstract

Keywords:
Subsidy; Fiscal Policy;
Economic Balance,
Role of Government,
Economy of Three
Sectors.

Subsidies are a fiscal policy instrument used by the government to intervene in the economy with the aim of achieving balance and improving people's welfare. In the context of a three-sector economy, subsidies play a role in maintaining economic stability. However, unbalanced subsidies and inappropriate targeting can cause economic inequality. Therefore, the government plays a role in developing strategies to balance subsidies so that they can provide maximum benefits. This written work was prepared using the library research method, which includes collecting data and information from various written sources, such as articles, journals, books and other related documents related to the discussion in the research. Research results show that regular evaluation can reduce negative impacts. Apart from that, the research also discusses the basic concepts of the three-sector economy and the role of government in the three-sector economy. This shows that the economic balance in the three sectors is strongly influenced by government intervention, especially through fiscal policy and the provision of subsidies. Thus, to achieve ideal economic balance, harmonious cooperation between government policy, production and consumption is needed.

Abstrak:

Kata Kunci:
Subsidi; Kebijakan
Fiskal; Keseimbangan
Ekonomi, Peran
Pemerintah,
Perekonomian Tiga
Sektor.

Subsidi merupakan instrument kebijakan fiskal yang dimanfaatkan oleh pemerintah untuk mengintervensi perekonomian dengan tujuan mencapai keseimbangan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam konteks perekonomian tiga sektor, subsidi berperan dalam menjaga stabilitas ekonomi. Namun ketidak seimbangan subsidi dan ketidak tepat sasaran dapat menyebabkan ketimpangan ekonomi. Oleh karena itu pemerintah berperan dalam menyusun strategi untuk menyeimbangkan subsidi agar dapat memberikan manfaat yang maksimal. Penelitian ini disusun dengan menggunakan metode kualitatif library research yang mencakup pengumpulan data dan informasi dari berbagai sumber tertulis, seperti artikel, jurnal, buku dan dokumen terkait lainnya yang bersangkutan dengan pembahasan dalam penelitian. Hasil peneltian menunjukkan bahwa evaluasi berkala dapat mengurangi dampak negatif. Selain itu penelitian

juga membahas tentang konsep dasar perekonomian tiga sektor dan peran pemerintah dalam ekonomi tiga sektor. Hal ini menunjukkan bahwa keseimbangan ekonomi dalam tiga sektor sangat dipengaruhi oleh intervensi pemerintah, terutama melalui kebijakan fiskal dan pemberian subsidi. Dengan demikian, untuk mencapai keseimbangan ekonomi yang ideal, diperlukan kerjasama yang erat antara kebijakan pemerintah, produksi, dan konsumsi.

How to Cite: Nabilah,I.Z. & Addainuri,M.A. 2025. Peran Pemerintah Dalam Menyeimbangkan Subsidi Sebagai Kebijakan Fiskal untuk Mendukung Perekonomian Tiga Sektor. *Jurnal Manajemen Ekonomi dan Bisnis (JMEBI)*, Vol 1, No. 2, DOI: xxxxx

Received : 25 Maret 2025 ; Revised: 03 April 2025 ; Accepted: 28 April 2025



© Jurnal Manajemen Ekonomi dan Bisnis (JMEBI).

JMEBI is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi suatu negara dapat didukung dengan mendorong pengembangan sektor industri. Sektor industri adalah salah satu pilar utama yang dapat mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi (Nurhayani, 2022). Perkembangan sektor industri ditandai dengan peningkatan produksi, diversifikasi jenis produk, peningkatan daya saing produk di pasar global, dan menarik investasi. Sektor industri diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat dan pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi. Peningkatan produk yang dihasilkan tentu akan menyebabkan peningkatan penyerapan tenaga kerja (Samosir et al., 2023).

Sektor industri berperan penting dalam mengatasi masalah pengangguran. Industrialisasi memiliki dampak yang signifikan terhadap perekonomian karena menyebabkan peningkatan arus masuk investasi, membuka jalan bagi sebanyak mungkin lapangan kerja baru dapat menciptakan efek pengganda yang signifikan dalam sektor perdagangan (Rahmadani & Yasin, 2024). Sehingga dampak ini semakin optimal jika ditinjau dalam konteks makro ekonomi di mana keseimbangan di antara tiga sektor utama: perusahaan, pemerintah, dan rumah tangga memegang peranan penting untuk mengetahui dinamika ekonomi.

Keseimbangan ekonomi dapat dijelaskan melalui interaksi tiga sektor utama: perusahaan, pemerintah, dan rumah tangga sangat penting untuk memahami dinamika makroekonomi. Peran perusahaan bukan hanya memberikan peluang kerja, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap pendapatan nasional melalui pembayaran pajak serta kontribusi sosial lainnya, sedangkan rumah tangga berperan sebagai konsumen utama dalam perekonomian dan pemerintah memiliki peran penting sebagai regulator dan pengelola kebijakan ekonomi. Interaksi antara ketiga sektor merupakan aspek yang sangat penting dalam mencapai keseimbangan ekonomi (Husna et al., 2024).

Keseimbangan ekonomi dalam konteks makro ekonomi tidak hanya bergantung pada peran masing-masing sektor tetapi juga pada bagaimana arus pendapatan dan

pengeluaran terintegrasi di antara ketiga sektor ini. Interaksi antara ketiga sektor ini menghasilkan dinamika ekonomi yang saling melengkapi, dan pendapatan nasional adalah kunci untuk memahami hubungan ini.

Keseimbangan ekonomi tercapai ketika total pendapatan nasional sama halnya dengan jumlah konsumsi rumah tangga, investasi bisnis, dan pengeluaran pemerintah. Pendapatan rumah tangga berperan dalam konsumsi, menabung, dan membayar pajak, sehingga terdapat hubungan untuk mencapai keseimbangan, jumlah investasi dan pengeluaran pemerintah harus mampu menutup kekurangan konsumsi dan menyeimbangkan pengeluaran berupa tabungan dan pajak. Dengan demikian, kondisi keseimbangan dalam sistem ini bergantung pada terpenuhinya hubungan antara aliran pendapatan dan pengeluaran di ketiga sektor tersebut (Ina et al., 2024).

Keseimbangan ekonomi yang dicapai melalui hubungan antara pendapatan nasional, konsumsi rumah tangga, investasi, serta belanja pemerintah, sangat bergantung pada kestabilan arus pendapatan di antara tiga sektor utama. Namun, untuk lebih memahami bagaimana perubahan dalam pengeluaran dan investasi memengaruhi perekonomian, konsep multiplier effect sangat penting untuk dipahami. Multiplier effect adalah suatu angka yang menggambarkan seberapa besar peningkatan pendapatan ekonomi masyarakat sebagai dampak dari perubahan (baik peningkatan maupun penurunan) pada berbagai variabel ekonomi (Laily & Pristiyadi, 2009). Konsep multiplier effect tidak hanya mencerminkan hubungan linier antara pengeluaran dan pendapatan, tetapi juga memperlihatkan bagaimana sebuah kebijakan atau perubahan ekonomi kecil dapat memberikan dampak yang signifikan bagi perekonomian secara keseluruhan. Inilah alasan mengapa pemahaman tentang efek pengganda sangat penting, terutama dalam konteks perencanaan ekonomi makro yang berkelanjutan dan inklusif.

Konsep itu menggambarkan seberapa besar dampak perubahan pengeluaran atau investasi mengenai pendapatan nasional atau produk domestik bruto (PDB). Multiplier effect ini mengansumsikan setiap unit pengeluaran baru akan memicu efek berantai dimana uang yang dikeluarkan akan berpindah dari satu sektor ke sektor lainnya, sehingga menciptakan pendapatan dan pengeluaran baru di setiap tahap. Angka pengganda ekonomi menggambarkan seberapa besar pengaruh pengeluaran baru terhadap perekonomian secara keseluruhan. Semakin tinggi angka pengganda ekonomi, semakin besar dampak yang ditimbulkan maka semakin tinggi dampak dari pengeluaran baru tersebut (Ina et al., 2024).

Selain itu, multiplier effect bukan hanya mencerminkan hubungan langsung antara pengeluaran dan pendapatan, namun juga menggambarkan bagaimana dampak awal dari suatu kebijakan ekonomi dapat menyebar ke berbagai sektor. Proses ini menciptakan siklus pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, sehingga kenaikan pendapatan menyebabkan konsumsi yang lebih tinggi, yang kemudian

memperkuat aktivitas ekonomi secara keseluruhan. Hal ini menjadi dasar bagi pemerintah dan pelaku ekonomi dalam merancang kebijakan yang dapat memaksimalkan manfaat dari setiap tambahan pengeluaran.

Efek pengganda merupakan sebuah gagasan yang dipakai dalam ekonomi untuk menggambarkan dampak belanja tambahan terhadap perekonomian secara totalitas. Contoh sederhana dari multiplier effect adalah ketika pemerintah meningkatkan pengeluarannya melalui subsidi atau proyek infrastruktur. Peningkatan pengeluaran hal ini akan menciptakan peluang kerja dan memperkuat pendapatan masyarakat. Ketika pendapatan masyarakat meningkat, mereka akan mengkonsumsi lebih banyak barang dan jasa yang, pada akhirnya akan mendorong permintaan terhadap produk-produk perusahaan. Peningkatan permintaan ini dapat menyebabkan peningkatan produksi, dan siklus ini terus berlanjut menghasilkan dampak ekonomi yang lebih besar dan pengeluaran awal (Rahmadani et al., 2024).

Multiplier effect yang dihasilkan dari peningkatan belanja pada hal-hal seperti subsidi dan proyek infrastruktur menunjukkan bahwa kebijakan fiskal, termasuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) memiliki peranan yang sangat krusial dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. APBN tidak hanya berfungsi sebagai perencanaan arus pemasukan dan pengeluaran keuangan negara, tetapi juga sebagai alat strategis untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produksi, dan mendukung kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menyajikan rincian yang mendetail mengenai rencana penerimaan dan pengeluaran negara yang berlangsung setiap tahunnya. Tujuan dari APBN untuk mengelola penerimaan dan pengeluaran negara dalam pelaksanaan berbagai kegiatan kenegaraan. Dengan demikian, APBN berperan penting dalam mengimplementasikan program-program yang bertujuan untuk meningkatkan produksi, membuka lapangan kerja, serta mendorong pertumbuhan ekonomi demi kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang positif suatu negara merupakan cerminan dari penyusunan dan pelaksanaan APBN yang efektif (Fadillah, 2022).

Pemerintah menerapkan kebijakan redistribusi pendapatan yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan kesenjangan pendapatan. Kebijakan ini dilakukan dengan memungut pajak dari masyarakat yang berpenghasilan tinggi, kemudian dana tersebut didistribusikan kembali kepada masyarakat berpenghasilan rendah melalui program belanja subsidi atau bantuan sosial. (Ramdani, 2024).

Subsidi dan bantuan sosial merupakan kebijakan redistribusi pendapatan yang sesungguhnya, yang ditujukan untuk mengurangi ketimpangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan kelompok berpendapatan rendah. Pemerintah berupaya meringankan beban pengeluaran dan meningkatkan daya beli rumah tangga miskin melalui berbagai bentuk dukungan, termasuk subsidi bahan bakar, listrik, dan kebutuhan sehari-hari. Kebijakan ini tidak hanya akan berkontribusi

terhadap stabilitas ekonomi bagi masyarakat miskin, tetapi juga meningkatkan akses mereka terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan perawatan kesehatan.

Dampak kebijakan subsidi, seperti subsidi BBM dan Listrik membantu mencegah masyarakat jatuh ke dalam kondisi keterbatasan ekonomi yang dapat diatasi dengan mengurangi beban finansial rumah tangga berpenghasilan rendah. Hal ini memungkinkan alokasi pendapatan untuk kebutuhan penting lainnya seperti pendidikan dan kesehatan. Bantuan sosial, sebagai instrumen kebijakan fiskal, meningkatkan daya beli dan akses terhadap kebutuhan dasar, sehingga dapat mengurangi tekanan ekonomi pada kelompok miskin dan rentan (Alfath et al., 2025).

Salah satu masalah utama dalam subsidi kesehatan adalah ketidaktepatan sasaran. Jaminan kesehatan yang bertujuan memberikan perlindungan kesehatan dan pemenuhan kebutuhan dasar, masih menghadapi kendala dalam distribusinya. Perbedaan proporsi peserta dari kelompok miskin, hampir miskin, dan tidak miskin menunjukkan bahwa program Jamkesmas belum sepenuhnya tepat sasaran. Masih ada penerima yang tidak berhak mendapatkan subsidi, sementara sebagian penduduk miskin dan hampir miskin belum tercatat sebagai peserta (Lutfiah et al., 2015).

Sedangkan masalah dalam penyaluran bantuan sosial dari Pemerintah Pusat adalah kurangnya pembaruan dan verifikasi data penerima bantuan. Data tersebut seharusnya diperbarui secara berkala untuk memastikan bantuan sosial dapat diberikan tepat sasaran, baik dalam situasi bencana maupun non-bencana. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 yang mengatur penanganan kaum fakir miskin, menteri bertanggung jawab menetapkan kriteria kelompok masyarakat bagian bawah, serta melakukan verifikasi dan validasi data setidaknya setiap dua tahun. Proses pelaporan dilakukan secara berjenjang, mulai dari Lurah/Kepala Desa hingga kepala daerah tingkat kabupaten/kota, selanjutnya dilanjutkan kepada kepala daerah tingkat provinsi dan dilanjutkan ke pimpinan menteri. Golongan masyarakat bawah yang belum terdaftar bisa mengajukan pendaftaran kepada lurah atau kepala desa, dan setiap perubahan data keluarga harus dilaporkan untuk diverifikasi ulang (Rahmansyah et al., 2020).

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis kontribusi berbagai sektor ekonomi khususnya sektor industri, ekonomi tiga sektor (rumah tangga, perusahaan, pemerintah), serta kebijakan subsidi dan bantuan sosial memiliki peran yang signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pengurangan kemiskinan

LANDASAN TEORI

Perekonomian Tiga Sektor

Perekonomian tiga sektor mencakup tiga komponen utama, yaitu sektor rumah tangga, sektor perusahaan, dan sektor pemerintah. Model perekonomian ini sering disebut sebagai perekonomian tertutup, karena tidak melibatkan perdagangan luar negeri, di mana masyarakat dan perusahaan tidak membeli atau menggunakan barang dan jasa yang diimpor. Analisis keseimbangan pendapatan nasional dalam konteks perekonomian tiga sektor bertujuan untuk menjelaskan bagaimana pendapatan nasional ditentukan dalam perekonomian yang melibatkan peran pemerintah (Herispon, 2009).

Pengertian dari perekonomian tiga sektor yaitu merupakan sistem yang mencakup tiga pihak utama yang meliputi sektor rumah tangga, sektor perusahaan dan sektor pemerintah. Disebut dengan perekonomian tidak terbuka karena tidak memungkinkan melibatkan perdagangan negara asing. Dalam kajian yang mendalam keseimbangan pemasukan keseluruhan suatu negara, peran pemerintah menjadi faktor utama dalam menentukan tingkat pendapatan nasional.

Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal dapat didefinisikan sebagai serangkaian langkah yang diambil oleh pemerintah untuk melakukan perubahan dalam sistem perpajakan atau pengelolaan belanja negara, dengan tujuan untuk mengatasi berbagai permasalahan ekonomi yang dihadapi (Sukirno, 2006). Kebijakan fiskal adalah penyalarsan pendapatan dan pengeluaran pemerintah yang diatur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bertujuan untuk mencapai kestabilan ekonomi yang lebih baik serta mendorong laju pembangunan ekonomi sesuai dengan rencana pembangunan yang telah ditetapkan (Sudirman, 2017).

Perlu diketahui dalam penerapannya ada dua jenis kebijakan fiskal. Pertama Kontraktif bertujuan utama untuk mengendalikan tingkat inflasi dan mengurangi ketidaksetaraan ekonomi, yang sering diukur dengan rasio Gini. Untuk mencapai hal ini, diperlukan pengurangan belanja pemerintah dan peningkatan tarif pajak. Di sisi lain, kebijakan fiskal ekspansif bertujuan untuk meningkatkan daya beli masyarakat terhadap barang dan jasa, sehingga perusahaan dapat mempertahankan produksinya dan menghindari pemecatan pekerja. Kedua jenis kebijakan ini saling melengkapi dan diterapkan secara kondisional, disesuaikan dengan situasi perekonomian negara guna memastikan stabilitas ekonomi tetap terjaga (Adzam et al., 2024).

Kebijakan fiskal merupakan sarana ekonomi yang dipakai oleh pemerintah guna mengatur perpajakan dan pengeluaran pemerintah guna mencapai stabilitas ekonomi dan pertumbuhan yang diinginkan. Kebijakan fiskal dapat bersifat kontraktif, yang bertujuan untuk mengekang inflasi dan kesenjangan ekonomi, atau

ekspansif, yang dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan beli masyarakat dan menjaga bisnis tetap berproduksi. Kebijakan-kebijakan ini memengaruhi permintaan agregat, konsumsi, dan investasi, membantu menjaga stabilitas ekonomi dalam menghadapi tantangan eksternal.

APBN

APBN adalah sebuah dokumen yang secara sistematis mencakup sumber-sumber penerimaan negara dan penyaluran pengeluaran negara dalam periode tertentu, biasanya selama satu tahun (Eeng & Epi, 2007). APBN secara filosofis mencerminkan kedaulatan rakyat, sehingga ditetapkan setiap tahun melalui undang-undang. Sebagai manifestasi dari kepercayaan rakyat kepada pemerintah dalam mengelola keuangan negara, APBN diharapkan dikelola secara akuntabel, transparan, dan adil (Darma et al., 2024).

APBN adalah instrumen yang mengatur pengeluaran dan pendapatan negara untuk mendanai pelaksanaan kegiatan pemerintahan serta pembangunan. Melalui APBN, diharapkan dapat mencapai pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan nasional, menjaga stabilitas perekonomian, dan menetapkan arah prioritas pembangunan secara keseluruhan (Yuliani, 2019).

Tujuan dari pembentukan APBN adalah untuk memastikan terciptanya keseimbangan dinamis dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan. Hal ini pada gilirannya bertujuan untuk meningkatkan output, menciptakan lebih banyak kesempatan kerja, dan meningkatkan produktivitas secara relatif. Semua ini diarahkan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, demi mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, baik secara material maupun spiritual, berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945 (Putri et al., 2024).

APBN merupakan susunan terstruktur yang mencatat pemasukan dan pengeluaran pemerintah dalam kurun waktu suatu tahun anggaran. Secara filosofis, APBN mencerminkan kedaulatan rakyat dan harus dikelola secara bertanggung jawab, transparan, dan adil. Sebagai instrumen ekonomi, APBN berfungsi mendanai kepemimpinan dalam mendorong pertumbuhan, menunjang kemajuan perekonomian guna menambah pemasukan negara, dan memelihara ketahanan ekonomi. Tujuan utama APBN adalah mewujudkan keseimbangan dinamis dalam pemerintahan untuk meningkatkan produksi, kesempatan kerja, dan produktivitas, sehingga terwujud masyarakat yang adil dan makmur, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945.

Subsidi

Subsidi (transfer) adalah bentuk pengeluaran negara, yang dirancang sebagai pajak negatif yang meningkatkan pendapatan, menerima subsidi, atau meningkatkan pendapatan riil ketika subsidi disubsidi oleh pemerintah untuk

sesuatu dengan harga jual yang lebih rendah. Subvent dapat dibedakan dalam dua bentuk: Yaitu, subsidi dalam bentuk uang (transmisi tunai) dan subsidi dalam bentuk barang atau interior (manfaat laba dalam bentuk subsidi) (Suparmoko, 2003).

Pada dasarnya, subsidi adalah dukungan finansial atau bahan baku dalam komunitas yang diberikan oleh yayasan, asosiasi, atau umumnya pemerintah (Herlin et al., 2021). Pemerintah juga dapat memberikan subsidi untuk memperkuat sektor-sektor tertentu tetap supaya meningkat atau tetap kokoh. Salah satu contoh subsidi pemerintah dalam bentuk barang adalah sembako. Dengan demikian, bantuan yang berupa barang modal dan uang untuk pembentukan modal usaha tidak termasuk dalam kategori ini (Sitepu et al., 2023).

Sistem pengelolaan subsidi di alokasikan dalam upaya meringankan beban masyarakat serta memastikan bahwa para produsen tetap mampu memproduksi barang dan jasa, terutama yang merupakan kebutuhan dasar masyarakat, pemberian subsidi menjadi langkah yang sangat penting. Selain itu, subsidi ini juga bertujuan untuk meningkatkan produksi pertanian dan memperbaiki kualitas pelayanan publik, khususnya di sektor transportasi dan komunikasi, serta menyerahkan insentif kepada dunia usaha dan masyarakat (Martawardaya & Adha, 2023).

Subsidi merupakan suatu bentuk pengeluaran pemerintah yang bertindak seperti pajak negatif dan meningkatkan pendapatan riil penerimanya. Subsidi datang dalam bentuk uang (bantuan tunai) atau barang (in kind subsidy) dan bertujuan untuk memungkinkan masyarakat mendukung sektor tertentu dan menjaga keseimbangan ekonomi. Subsidi tidak hanya mengurangi beban masyarakat, tetapi juga membantu mempertahankan produksi barang dan jasa, mengoptimalkan hasil pertanian, memperkuat sistem layanan masyarakat, dan menciptakan dukungan finansial untuk sektor bisnis.

Industri

Istilah industri sering diidentikkan dengan Semua aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh manusia melibatkan pengolahan barang mentah atau bahan baku menjadi barang setengah jadi, barang jadi, atau barang dengan nilai guna yang lebih tinggi. Dalam pengertian yang lebih mendalam industri dapat dipahami sebagai keseluruhan aktivitas manusia dalam bidang ekonomi yang bersifat produktif dan komersial, yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup (Utoyo, 2009).

Sektor industri ini mencakup beragam jenis industri, antara lain industri makanan, minuman, dan tembakau; pemintalan tekstil, pakaian, serta kulit; industri kayu beserta produk-produk kayunya; kertas dan percetakan; alat transportasi; barang-barang logam; serta berbagai industri lainnya. Selain itu, terdapat juga industri kimia, pupuk, produk dari tanah liat dan semen, serta industri logam dasar (Saptutyingsih, 2005).

Sektor industri memainkan peran penting dalam perekonomian Indonesia, menempati posisi kedua setelah sektor pertanian. Sektor ini berkontribusi signifikan terhadap pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Sejak tahun 1991, sektor industri telah berhasil menjadi sektor utama, dan pada tahun 1999, posisinya semakin kuat sebagai penyumbang terbesar dalam perekonomian nasional (leading sector) dengan mengalahkan peran sektor pertanian. Sebagai ilustrasi di tahun 1999 Peran sektor industri pengolahan dalam pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) sangat signifikan, mencapai lebih dari seperempat, yaitu sebesar 25,8%. Di sisi lain, sektor pertanian hanya berkontribusi sebesar 19,4%. Menariknya, kontribusi sektor pertanian ini bahkan lebih rendah dibandingkan dengan kontribusi industri non-migas yang mencapai 23,3% (Hasang & Nur, 2020).

Industrialisasi adalah salah satu kekuatan pendorong perubahan sosial ekonomi sebagai bagian dari alternatif sistem kehidupan pertanian masyarakat industri. Industrialisasi adalah penyakit di mana masyarakat melakukan utuh aktivitasnya dengan berpusat terhadap kegiatan ekonomi yang mencakup sebuah pekerjaan. Industrialisasi merupakan bagian dari mekanisme yang modern, maka pembangunan ekonomi dan juga perubahan sosial memiliki hubungan yang kuat dengan adanya penemuan baru (Wibowo et al., 2023).

Industri ini adalah sejumlah perusahaan serupa untuk pembuatan barang dan jasa. Arti industri sendiri dalam ilmu ekonomi makro yaitu sebuah proses yang dijalankan oleh perusahaan untuk menciptakan produk dengan nilai tambah. Sedangkan dalam ilmu ekonomi mikro industri mengacu pada kelompok perusahaan yang menjalankan aktivitas sejenis atau memproduksi barang-barang yang memiliki kesamaan. (Julianto & Suparno, 2016).

Industri memuat semua aktivitas ekonomi yang mengelola material dasar beralih menjadi barang yang lebih berguna dan memainkan peranan penting dalam perekonomian nasional. Sektor industri mencakup berbagai sektor, termasuk makanan, tekstil, kayu, logam dan kimia, dan telah melampaui sektor pertanian sebagai sektor terpenting dalam menghasilkan PDB Indonesia sejak tahun 1991. Industrialisasi telah menjadi kekuatan pendorong di balik perubahan sosial-ekonomi dengan mengubah kehidupan. Ini mencerminkan modernisasi dan inovasi, dari ekonomi pertanian ke ekonomi industri. Dalam ekonomi makro, sementara industri adalah rangkaian aktivitas suatu proses yang menciptakan nilai sedangkan dalam ekonomi mikro, industri terdiri dari bisnis yang menghasilkan barang dan jasa serupa.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian ini memanfaatkan penelitian kualitatif. Definisi penelitian kualitatif merupakan metode yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian (Zakariah et al., 2020). Sumber dan jenis informasi yang dipakai dalam studi ini yaitu menggunakan data sekunder. Data sekunder merujuk pada sumber data penelitian yang diperoleh melalui para peneliti yang melakukan penelitian secara tidak langsung dengan memanfaatkan media sebagai perantara (Ahmad et al., 2024). Metode ini juga melibatkan metode library research, library research adalah kegiatan penelitian yang dilaksanakan dengan mengumpulkan informasi dan data menggunakan berbagai sumber yang tersedia di perpustakaan. Sumber-sumber tersebut meliputi buku referensi, hasil penelitian sejenis yang telah dilakukan sebelumnya, artikel, catatan, serta berbagai jurnal yang relevan dengan permasalahan yang ingin dipecahkan (M. Sari & Asmendri, 2020).

Pendekatan ini bertujuan agar memahami dan menganalisis tentang pentingnya sektor industri dalam mengurangi pengangguran dan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui lapangan pekerjaan. Selain itu, dijelaskan tentang peranan dalam perekonomian tiga sektor dimana hal ini meliputi sektor rumah tangga, sektor perusahaan, dan sektor pemerintah. Dari sektor tersebut serta memiliki peranan tersendiri untuk menciptakan keseimbangan ekonomi.

Dalam mendukung pertumbuhan ekonomi APBN memiliki peran melalui kebijakan fiskal, subsidi dan redistribusi pendapatan. Subsidi dan bantuan sosial memiliki tujuan untuk mengurangi ketimpangan ekonomi dan meningkatkan daya beli masyarakat miskin, meskipun terdapat tantangan seperti ketidak tepat sasaran dan kurangnya pembaruan data penerima bantuan sosial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Perekonomian Tiga Sektor

Penjelasan mengenai perekonomian tiga sektor yang mencakup analisis mengenai pihak ekonomi di suatu wilayah negara yang berskala nasional. Terdapat tiga sektor utama dalam pembahasan ini, yaitu sektor rumah tangga, sektor perusahaan, dan sektor pemerintah. (Hasan et al., 2023).

Keterkaitan ketiga sektor tersebut sangat prioritas agar mencapai keseimbangan ekonomi sangat penting saat perusahaan menjalankan operasinya dengan optimal dan mengeluarkan barang dan jasa yang diperlukan oleh rumah tangga semakin meningkat seiring dengan bertambahnya pendapatan rumah tangga yang kemudian mendorong penggunaan. Peningkatan konsumsi ini menciptakan permintaan yang konsisten terhadap barang dagangan sehingga menggerakkan pertumbuhan pengolahan dan penanaman modal. Sementara itu, pemerintah berperan dalam mewujudkan lingkungan yang mendukung kegiatan pekonomian dijalankan dengan

menerapkan kebijakan yang merangsang penanaman modal, pengembangan sarana, serta melindungi stabilitas makro ekonomi (Husna et al., 2024).

Dengan demikian, dalam menganalisis perekonomian yang terdiri dari tiga sektor, penting untuk memperhatikan peran dan pengaruh pemerintah terhadap aktivitas di dalam perekonomian tersebut (Shubhie, 2019). Fungsi pemerintah dalam bidang ekonomi sebagai pihak yang menyediakan barang publik. Penyediaan tersebut memerlukan dukungan pembiayaan. Pembiayaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah berasal dari sumber pajak. Oleh karena itu, pemerintah akan memungut pajak tersebut dan mengalokasikannya untuk membiayai berbagai program pembangunan (Ekasari, 2023).

Pemerintah bertindak sebagai penyedia produk dan layanan publik yang didanai lewat pajak. Pajak yang terkumpul digunakan untuk mengembangkan masyarakat dan menyediakan layanan. Selain itu, pemerintah juga bertindak sebagai pengalokasi dengan memberikan transfer dan subsidi dalam bentuk jaminan sosial, tunjangan pengangguran, hibah, dan bantuan lainnya untuk meningkatkan barang publik.

Dalam konteks ini, pemerintah memiliki peran sebagai pihak yang mendistribusikan sumber daya. Selain mengumpulkan pajak, pemerintah juga berfungsi sebagai distributor yang menyediakan berbagai layanan publik kepada masyarakat. Pengeluaran pemerintah, yang sering disebut sebagai transfer atau subsidi, diberikan kepada individu untuk tujuan tertentu tanpa kewajiban untuk mengembalikannya. Transfer ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan warga atau konsumen dan bisa berupa jaminan sosial, tunjangan pengangguran, hibah, bantuan, atau hadiah (Hasan et al., 2023)

Berdasarkan perputaran arus pendapatan, hubungan timbal balik antara sektor perusahaan dan rumah tangga dapat dikategorikan menjadi dua bentuk utama, yaitu hubungan yang terjadi dalam pasar barang serta keterkaitan dalam pasar input (Hidayatullah, 2019).

Pasar merupakan lokasi di mana penjual dan pembeli bertemu. Dalam Islam, pasar harus berfungsi dengan baik dan adil, tanpa merusak untuk mendapatkan keuntungan cepat. Ketidak sempurnaan pasar adalah tantangan yang harus diatasi, terutama oleh pemerintah. Masalah ini sering muncul karena manipulasi di sisi penawaran atau permintaan, serta informasi yang tidak sempurna. Informasi sangat penting dalam pengambilan keputusan. Salah satu penyebab ketidak sempurnaan pasar yang umum adalah ihtikâr (monopoli), yang sering dilakukan oleh individu-individu yang tidak memiliki tanggung jawab (Fatah, 2012).

Pelaksanaan monopoli serta kompetisi bisnis yang tidak adil adalah ancaman utama terhadap terciptanya perekonomian yang seimbang dan efisien. Dalam hal ini, kebijakan anti monopoli yang berfungsi sebagai alat penting untuk melindungi konsumen sekaligus menjaga dinamika pasar agar tetap efisien (Anggraeni, 2024).

Monopoli terjadi saat ketika satu atau lebih pelaku usaha mendominasi pasar secara signifikan, dengan demikian mereka memiliki kemampuan untuk menentukan harga, merendahkan standar produk, dan bahkan menghambat kesempatan bagi pemilik usaha lain, terutama bisnis skala kecil dan menengah (Rizal et al., 2023).

Konsumsi sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah. Kegiatan harian menggunakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai kepuasan. Tingkat konsumsi yang tinggi menunjukkan kesejahteraan, namun dipengaruhi oleh pendapatan per kapita. Investasi tidak selalu mempercepat pertumbuhan ekonomi, dan dampaknya bervariasi antar daerah. Pengeluaran pemerintah juga berperan penting, di mana kebijakan yang meningkat bisa mendorong pertumbuhan ekonomi (Darwin, 2020).

Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal yaitu strategi yang berdampak pada penghasilan dan pengeluaran negara. Keputusan ini dapat di definisikan sebagai upaya pemerintah dalam melakukan penyesuaian terhadap sistem perpajakan maupun pengelolaan belanja negara dengan tujuan mengatasi berbagai permasalahan ekonomi yang muncul (Aziz et al., 2024).

Di negara berkembang layaknya Indonesia, prinsip anggaran berimbang sering kali terabaikan akibat kekurangan yang dihadapi pemerintah. Salah satu faktor utama yang menyebabkan masalah ini adalah kekakuan struktural dalam perekonomian Indonesia, yang menciptakan jurang antara harapan pertumbuhan dan batasan yang ada. Di era pemerintahan Nizam Lama, mengalami defisit anggaran diatasi dengan mencetak uang baru yang beredar di dalam negeri, yang pada akhirnya menyebabkan tekanan kenaikan harga meningkat secara drastis (Fahriya et al., 2024).

Kebijakan fiskal di Indonesia terlihat jelas melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kebijakan ini memiliki peranan penting dalam mengendalikan inflasi guna mencegah terjadinya krisis moneter, serta dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang signifikan dan merata. Pertumbuhan ekonomi yang stabil sangat berpengaruh pada kebijakan fiskal yang terwujud dalam APBN (Isnaini, 2017).

Kebijakan fiskal di Indonesia memainkan peran penting dalam mempengaruhi permintaan agregat, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Kebijakan ini tidak hanya mendorong peningkatan konsumsi dan investasi domestik, tetapi juga berkontribusi pada stabilitas ekonomi ketika menghadapi guncangan eksternal. Penelitian menunjukkan bahwa penerapan kebijakan fiskal yang tepat dapat menjadi faktor kunci dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (F. M. Sari et al., 2024).

Tugas dari badan kebijakan fiskal melaksanakan penyusunan dan pengajuan rekomendasi kebijakan dibidang fiskal dan sektor keuangan harus berjalan sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di sinilah peran penting dari fungsi Badan Kebijakan Fiskal sebagai Penyusunan kebijakan teknis mencakup rencana dan program analisis serta perumusan rekomendasi kebijakan di bidang fiskal dan sektor keuangan, Kerjasama ekonomi serta finansial global, pelaksana analisis dan penyusunan rekomendasi kebijakan di bidang fiskal serta sector dana (Lubis, 2024).

Program pemerintah untuk mengatasi masalah sosial-ekonomi terfokus pada bantuan sosial. Bentuk dari bantuan sosial ini mencakup Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Langsung Tunai (BLT), serta Kartu Prakerja. Pemerintah telah memperluas dan meningkatkan program sosial ini guna memberikan dukungan yang lebih besar kepada masyarakat. Selain itu, pemerintah juga meluncurkan program pemulihan ekonomi, yang bertujuan untuk membantu sektor-sektor yang terdampak, seperti perdagangan, pariwisata, dan industri kreatif. Dengan adanya program-program ini, pemerintah berharap dapat mengurangi tingkat kemiskinan dan memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan (Alfiyati et al., 2024).

Strategi Penyaluran Subsidi

Indonesia sebagai negara berkembang masih berfokus pada upaya pengentasan kemiskinan. Di antara berbagai tantangan yang dihadapi, kemiskinan menjadi persoalan utama. Kondisi ini menyebabkan jutaan penduduk mengalami keterbatasan dalam mengakses pendidikan berkualitas, kesulitan mendapatkan layanan kesehatan, serta minimnya akses terhadap pelayanan publik. Lebih dari itu, banyak masyarakat yang bahkan berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal. Meski kemiskinan juga terjadi di negara maju, dampaknya tidak sebesar yang dialami oleh negara berkembang (Rahmalia et al., 2019).

Guna mengatasi kemiskinan yang memengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat, diperlukan strategi yang tepat dalam menyalurkan subsidi, termasuk program jaminan kesehatan. Salah satu langkah untuk meningkatkan efisiensi dan ketepatan sasaran program ini adalah memastikan penentuan penerima manfaat dilakukan dengan akurat.

Salah satu cara untuk meningkatkan efisiensi dan ketepatan sasaran adalah dengan menghindari kesalahan dalam penentuan penerima manfaat. Hal ini dapat dilakukan melalui validasi sistem alokasi dan database golongan ekonomi lemah, serta evaluasi ulang secara berkala. Dibutuhkan sinkronisasi data perantara antara Kementerian Kesehatan dan Lembaga kesehatan daerah untuk memastikan pendaftar yang belum terdaftar dapat segera ditangani. Selain itu, pembaruan data

peserta secara rutin sangat penting guna mengurangi ketidaktepatan sasaran, seperti peserta yang telah meninggal, pindah tempat tinggal, atau mengalami peningkatan status ekonomi. Pengawasan dan evaluasi dalam proses penetapan peserta serta distribusi kartu kepesertaan juga menjadi langkah krusial untuk memastikan efektivitas program. Evaluasi ini dapat menjadi bahan pembelajaran bagi perbaikan dan pengembangan program jaminan kesehatan di masa mendatang (Lutfiah et al., 2015).

KESIMPULAN

Penelitian menyimpulkan bahwa perekonomian tiga sektor mencerminkan interaksi yang erat antara rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah, yang saling berkontribusi untuk mencapai keseimbangan ekonomi. Pemerintah memainkan peran penting dalam merumuskan kebijakan yang mendukung investasi dan stabilitas makroekonomi. Namun, berbagai ketidaksempurnaan pasar, seperti monopoli dan persaingan yang lemah, menjadi tantangan yang harus dihadapi agar perekonomian dapat berlangsung secara adil dan efisien.

Kebijakan fiskal bertujuan untuk mengelola pendapatan dan pengeluaran negara guna mencapai tujuan yang diinginkan dan mengatasi permasalahan ekonomi yang ada. Di negara berkembang, defisit anggaran sering kali menjadi salah satu tantangan utama akibat struktur ekonomi yang kurang fleksibel. Oleh karena itu, sangat penting untuk merumuskan dan merekomendasikan kebijakan fiskal yang efektif demi menjaga stabilitas ekonomi dan keuangan negara.

Subsidi memainkan peran krusial dalam upaya pengentasan kemiskinan, khususnya di sektor kesehatan. Agar subsidi dapat tepat sasaran, diperlukan sistem alokasi yang akurat melalui validasi serta sinkronisasi data penerima manfaat. Pengawasan dan evaluasi yang berkelanjutan menjadi kunci untuk meningkatkan kinerja program serta memastikan bahwa bantuan disalurkan kepada mereka yang benar-benar membutuhkannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adzam, M., Etania, A. R., & Alviyani, F. A. (2024). Pentingnya Kebijakan Fiskal dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Kendali Akuntansi*, 2(2). <https://journal.widyakarya.ac.id/index.php/jka-widyakarya/article/view/2958/2664>
- Ahmad, Fachrurrazy, M., Hartati, S. Y., Amalia, M., Fauzi, E., Gaol, S. L., Siliwadi, D. N., & Takdir. (2024). *Buku Ajar METODE PENELITIAN & PENULISAN HUKUM*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Alfath, N. D., Andiny, P., Rizal, Y., & Safuridar. (2025). Pengaruh Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Subsidi terhadap Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, 3(1).

- Alfiyati, M., Laila, A. N., Amalia, F., & Catur, P. (2024). Peran Kebijakan Fiskal dalam Menstabilkan Ekonomi Selama Krisis Ekonomi Global: Studi Kasus di Indonesia pasca Covid-19. *JEKP (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Publik)*, 11(1). <https://doi.org/10.33701/jekp.v11i1.4479>
- Anggraeni, U. B. (2024). Menggali Peran Hukum Persaingan Usaha dalam Mendorong Inovasi dan Efisiensi Ekonomi. *RECHTSVACUUM: JOURNAL OF LEGAL STUDIES*, 1(1).
- Aziz, A., Alifa, N. L., Insani, S. A. P., Maulana, R., Khalilla, S., Putri, M., Rahayu, A. S., Nafa, M. A., Widianingsih, S., Mubarak, F., Nurhidayah, I., Ummah, E. R., Naufal, M. R., Shafiyah, A., Syahdan, I. M., Safitri, W., Mawadah, I. Y., Ferdiansyah, A., Zahra, A. M., ... Tasahkun. (2024). *Kebijakan Fiskal dan Keuangan Islam*. CV. Andanu Abimata.
- Darma, S. P., Harliza, N., Ginting, D. A. B., & Kemala, P. (2024). Analisis Efisiensi dan Transparansi APBN Indonesia: Studi Kasus Tahun Terbaru. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 5(4). <https://doi.org/10.47467/elmal.v5i4.1101>
- Darwin, R. (2020). Determinan Pertumbuhan Ekonomi Dalam Model Perekonomian Tiga Sektor Determinants Of Economic Growth On the Three Sector Economic Model. *Jurnal Akuntansi & Ekonomika*, 10(1). <http://ejurnal.umri.ac.id/index.php/jae>
- Eeng, A., & Epi, I. (2007). *Ekonomi dan Akuntansi: Membina Kompetensi Ekonomi*. PT Grafindo Media Pratama.
- Fadillah, N. (2022). Peranan APBN Dalam Program Jaring Pengaman Sosial Sebagai Instrumen Penanganan Pandemi Covid-19. *L Renaissance*, 7(3).
- Fahriya, Maimunah, A., Muawanah, & Fatonah. (2024). DINAMIKA INFLASI DI INDONESIA: ANALISIS FAKTOR- FAKTOR PENYEBAB INFLASI DAN DAMPAK TERHADAP PEREKONOMIAN. *JURNAL MEDIA AKADEMIK (JMA)*, 2(6).
- Fatah, D. A. (2012). Monopoli dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 4(2). <https://doi.org/10.33087/jiubj.v22i2.2090>
- Hasan, A., Syahwa, A. P., Fitria, S. D., Wardah, S. M., & Sunarsih. (2023). Hubungan Perekonomian Tiga Sektor Dengan Kebijakan Fiskal, Zakat, dan Infak. *Al-Iqtishod: Jurnal Ekonomi Syariah*, 5(2). <https://doi.org/10.51339/iqtis.v5i2.1133>
- Hasang, I., & Nur, M. (2020). *PEREKONOMIAN INDONESIA*. Ahlimedia Book.
- Herispon. (2009). *Buku Ajar Ekonomi Makro*. AKADEMI KEUANGAN & PERBANKAN RIAU SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI RIAU.
- Herlin, F., Rosita, R., & Basri, H. (2021). *Keuangan Daerah*. CV. AZKA PUSTAKA.
- Hidayatullah, I. (2019). PERAN PEMERINTAH DALAM STABILITAS EKONOMI PASAR. *Iqtishoduna: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(1). <https://doi.org/10.20885/unisia.vol16.iss31.art2>
- Husna, H., Nasution, A. K., Afriliani, I., & Fitriana, N. (2024). Analisis Keseimbangan

- Ekonomi Tiga Sektor Dalam Perspektif Makro Ekonomi. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Digital*, 02(01).
- Ina, A., Iranisa, N., Zulfatu, N., W, U. M., & Sarpini. (2024). MENJAGA KESEIMBANGAN PEREKONOMIAN DALAM PERSPEKTIF TIGA SEKTOR: RUMAH TANGGA, PERUSAHAAN, DAN PEMERINTAH. *Neraca Manajemen, Ekonomi*, 11(10).
- Isnaini, D. (2017). Peranan Kebijakan Fiskal Dalam Sebuah Negara. *E-Journal System IAIN Bengkulu (Institut Agama Islam Negeri)*, 3(1).
- Julianto, F. T., & Suparno. (2016). ANALISIS PENGARUH JUMLAH INDUSTRI BESAR DAN UPAH MINIMUM TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI KOTA SURABAYA. *Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 1(2).
- Laily, N., & Pristiyadi, B. (2009). *Teori Ekonomi*. Graham Ilmu.
- Lubis, R. P. (2024). *Kebijakan Fiskal dan Moneter*. Serasi Media Teknologi.
- Lutfiah, U., Setiawan, E., & Lucia, S. S. (2015). Ketidaktepatan Sasaran Jamkesmas Berdasarkan Kriteria Miskin Pendataan Program Perlindungan Sosial. *Kesmas: National Public Health Journal*, 9(4). <https://doi.org/10.21109/kesmas.v9i4.750>
- Martawardaya, B., & Adha, I. A. F. (Eds.). (2023). *Akselerasi menuju ekonomi Indonesia yang hijau, inklusif, dan unggul*. INDEF.
- Nurhayani. (2022). Analisis sektor industri manufaktur di Indonesia. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 17(3). <https://online-journal.unja.ac.id/paradigma/article/view/20477>
- Putri, C. A., Noviantini, E. F., Ramadhani, F. N., & Fadilla, A. (2024). Peran APBN dalam Meningkatkan Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah di Indonesia. *Journal of Regional Economics and Development*, 1(3). <https://doi.org/10.47134/jred.v1i3.202>
- Rahmadani, R., Aprilia, D., Yuliarti, D., & Sarpini. (2024). KORELASI ANTARA INSTRUMEN KEBIJAKAN FISKAL (PAJAK) DENGAN MULTIPLIER EFFECT DALAM MEMPENGARUHI KESEIMBANGAN PEREKONOMIAN TIGA SEKTOR. *Neraca Manajemen, Ekonomi*, 11(4).
- Rahmadani, R., & Yasin, M. (2024). STRATEGI INDUSTRIALISASI “STRATEGI INDUSTRI PADA EKONOMI MAKRO.” *Jurnal Ilmu Manajemen, Bisnis Dan Ekonomi JIMBE*, 1(5).
- Rahmalia, S., Ariusni, & T, M. (2019). Pengaruh tingkat pendidikan, pengangguran , dan kemiskinan terhadap kriminalitas Di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Pembangunan*.
- Rahmansyah, W., Qadri, R. A., Sakti, R. R. A., & Ikhsan, S. (2020). Pemetaan Permasalahan Penyaluran Bantuan Sosial Untuk Penanganan Covid-19 Di Indonesia. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 2(1). <https://doi.org/10.31092/jpkn.v2i1.995>
- Ramdani, S. A. (2024). Dampak Belanja Subsidi dan Bantuan Sosial dari APBD

- terhadap Kesenjangan Pendapatan di Indonesia. *Jurnal Manajemen Perbendaharaan*, 5(1). <https://doi.org/10.33105/jmp.v5i1.524>
- Rizal, Natzir, A. W., Sukmawati, & Anwar, D. R. (2023). Pengaruh Etika Pengelolaan Dan Persaingan Dalam Bisnis Online Shop. *YUME : Journal of Management*, 6(3).
- Samosir, S., Nurjanah, R., & Zainul, B. (2023). Analisis Determinan Sektor Industri Pengolahan di Indonesia. *E-Journal Perdagangan Industri Dan Moneter*, 11(3).
- Saptutyningsih, E. (2005). Dampak kontraksi sektor industri terhadap penyerapan tenaga kerja dan pendapatan rumah tangga di Indonesia sesudah krisis (1999) Pendekatan structural path analysis (SPA). *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 3(2005), 241–263.
- Sari, F. M., Astuti, A., Zamanda, D., Restu, F. P., & Fadilla, A. (2024). Kebijakan Fiskal dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Indonesia. *Journal of Economics, Assets, and Evaluation*, 1(4). <https://doi.org/10.47134/jeae.v1i4.231>
- Sari, M., & Asmendri. (2020). Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA Milya. *NATURAL SCIENCE: Jurnal Penelitian Bidang IPA Dan Pendidikan IPA*, 6(1), 41–53.
- Sitepu, A. P., Salihi, Chartadi, R., Pardede, R. M., Afriyadi, & Alamsyahbana, M. I. (2023). *KEUANGAN DAERAH*. CV. AZKA PUSTAKA.
- Sudirman, I. W. (2017). *Kebijakan Fiskal dan Moneter: Teori dan Empirikal*. Prenada Media.
- Sukirno, S. (2006). *MAKROEKONOMI TEORI PENGANTAR*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Suparmoko. (2003). *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktik*. BPFE.
- Utoyo, B. (2009). *Geografi: Membuka Cakrawala Dunia untuk Kelas XI Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah Program Ilmu Pengetahuan Sosial*. Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional.
- Wibowo, A., Kusumawati, N. A., Athira, Y. M., Ananda, P., & Antoni, H. (2023). Analisis Dampak Kawasan Industri Terhadap Lingkungan Masyarakat di Kecamatan Gunungputri. *Jurnal Pemuliaan Hukum*, 5(2). <https://doi.org/10.30999/jph.v5i2.2637>
- Yuliani, I. (2019). *Pengaruh Belanja Dan Investasi Terhadap Kemandirian Dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah*. Uwais Inspirasi Indonesia.
- Zakariah, M. A., Afriani, V., & Zakariah, M. (2020). *METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF, KUANTITATIF, ACTION RESEARCH, RESEARCH AND DEVELOPMENT (R n D)*. Yayasan Pondok Pesantren Al-Mawaddah Warrahmah.